

Evaluasi Kebijakan Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Pemalang Pada Periode 2006-2010

Oleh:

Agnes Riski Akmalia (14010110120044)

Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

Universitas Diponegoro

Jl. Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kotak Pos 1269

Website : <http://www.fisip.undip.ac.id> / Email : fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

This study was conducted to explain the results of the evaluation of Human Development Index (HDI) in Pemalang. Human Development Index is one measure of UNDP to determine the progress of development in an area especially of human development. The indicators for measuring the Human Development Index is the life expectancy index, education index and the income index. In Pemalang, the achievement that gained was 69.89% in 2010 with a ranking of 34 from all district / city in Central Java. When compared with Pekalongan District in ranking 23 and Tegal District in ranking 8, Pemalang very far behind. So the question is why the Human Development Index in Pemalang low? What the programs of increasing the Human Development Index was according to the target? Human Resources was available? Was the amount of budget also supporting?

In order to explain the evaluation of Human Development Index in Pemalang, then used the evaluation method and descriptive analysis with using a quantitative approach. Where the source data obtained from secondary data sources. The coverage of analysis through a qualitative approach that aimed to relevant agencies namely Education, Health, Labor and Transmigration, Bappeda, public hospital, Economy, Doctors, Midwives and School principal.

The results showed that when viewed from criteria of the Dunn evaluation, improvement programs of Human Development Index has been fairly good. Although in terms of funds allocated is also still an obstacle due to the increasing needs of the community. The low ranking

of Pemalang also not free from the causes therein, the awareness factor of the community in accessing services from the government and the lack of investment development in Pemalang district. Moreover, with substantial funds in education sector reached 58%, medical of 13% and purchasing power of 7%. It showed that Pemalang District was seriously in the increase of Human Development Index. Although ranking that obtained still ranking of 34 but each year the percentage of Human Development Index showed an increasing of 67.4% in 2006 to 69.89% in 2010. This is also evidenced by the superiority of several indicators with Tegal district in education and health sector.

Recommendations for this study are to develop an active standby village, improving healthcare, optimizing procurement scholarship, Packet, infrastructure and economic development, increasing local investment, and all that.

A. PENDAHULUAN

Pembangunan merupakan fase awal menuju tahapan-tahapan dalam mencapai sebuah target yang akan dituju dari berbagai perspektif (tandoro, 2006:1). Menurut Todaro (2003:28) pembangunan merupakan suatu kenyataan fisik sekaligus tekad suatu masyarakat untuk berupaya sekeras mungkin melalui serangkaian kombinasi proses sosial, ekonomi, dan isntitusal demi mencapai kehidupan yang serba lebih baik. Salah satunya didalam pembangunan manusia yang dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan mutu pencapaian kualitas hidup dan kesejahteraan sosial. Indeks Pembangunan Masyarakat (IPM) memiliki beberapa indeks dimensi yang mempengaruhi lajunya, yaitu angka harapan hidup dalam indeks kesehatan, angka melek huruf dan rata-rata sekolah yang mewakili indeks pendidikan dan kehidupan yang layak dengan melihat pengeluaran per Kapita Riil yang disesuaikan (PPP Rupiah) yang mewakili indeks pendapatan.

Hasil pemantauan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) masing-masing daerah berbeda-beda di setiap provinsi maupun kabupaten/kota. Salah satunya di provinsi jawa tengah yang memiliki rata-rata besaran IPM 72,10 %. Berikut adalah gambaran umum Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 6 kabupeten/kota di karasidenan Pekalongan, 2 kabupaten dikarasidenan Banyumas :

Tabel A.1
Tabel Indeks Pembangunan Manusia
Di Kabupaten Pemalang Dan Wilayah Sekitarnya
Tahun 2006-2010

NO	Rank	Wilayah	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)				
			2006	2007	2008	2009	2010
1	8	Kota Tegal	72,4	72,72	73,2	73,63	73,89
2	5	Kota Pekalongan	72,5	73,1	73,49	74,01	74,47
3	15	Kabupaten Banyumas	70,8	70,8	71,8	72,27	72,6
4	21	Kabupaten Purbalingga	69,9	69,9	70,9	71,51	72,07
5	23	Kabupaten Pekalongan	69,4	69,9	70,9	71,51	72,07
6	30	Kabupaten Tegal	67,8	68,83	69,54	70,08	70,59
7	34	Kabupaten Pemalang	67,4	67,89	68,38	69,02	69,89
8	35	Kabupaten Brebes	65,9	66,57	67,08	67,69	68,2
9		Jawa Tengah	70,3	70,92	71,6	72,1	72,49

Sumber: Laporan Bappeda Kabupaten Pemalang 2008-2010

Dari tabel 1.1 dapat terlihat bahwa dalam persentase IPM Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Pemalang menduduki peringkat ke 34 dari 35 kabupaten/ kota di Jawa Tengah. Peringkat kabupaten Pemalang hanya lebih baik dibandingkan kabupaten Brebes. Dimana dari tabel diatas IPM Kabupaten Pemalang pada tahun 2010 sebesar 69,89 masih tertinggal dengan kabupaten-kabupaten yang lain. Dimana kota Tegal juga sudah menepati peringkat ke 8 dengan besaran 73,89. Hal ini memperlihatkan perbedaan yang jauh di antara keduanya dengan presentasi yang jauh antara 69,89 dengan 73,89.

Kondisi seperti ini menjadikan suatu keprihatinan bagi pemerintah untuk lebih memperhatikan proses pembangunan manusia itu sendiri, Seperti halnya salah satu kabupaten/kota di Jawa Tengah yakni kabupaten Pemalang. Dengan kondisi yang strategis melewati jalur pantura yang diapit oleh dua kota/kabupaten Tegal dan Pekalongan, membuat keprihatinan tersendiri dengan besaran IPM 69,89 %. Dimana dengan letak yang strategis seperti itu membuat kabupaten Pemalang seharusnya mengacu pada tetangga Kabupaten Tegal. Dimana Kabupaten Tegal menduduki peringkat ke 8.

Apalagi dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 24 Tahun 2008 tentang rencana pembangunan jangka panjang kabupaten Pemalang tahun 2005-2025. Tentu saja dari acuan peraturan daerah tersebut membuat pemerintah daerah lebih bisa memprioritaskan pembangunan, baik pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana bahkan dalam meningkatkan pembangunan manusia dalam tiga sektor tersebut di

Kabupaten Pematang. Itu semua mengingat pula visi Bupati Pematang yang menyatakan cerdas, berdaya saing dan berakhlak mulia.

Permasalahan yang kemudian menarik untuk dibahas adalah mengapa Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Pematang rendah? Apakah program-program peningkatan Indeks Pembangunan Manusia sudah sesuai target? Sumber Daya Manusia sudah tersedia? Apakah jumlah anggarannya juga mendukung?

Penelitian tentang evaluasi kebijakan Indeks Pembangunan Manusia kabupaten Pematang antara lain: Untuk mengetahui Program-program Indeks Pembangunan Manusia (IPM); Untuk mengetahui hasil yang dicapai oleh Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan program-program Indeks Pembangunan Manusia; Untuk mengetahui kualitas Sumber Daya Manusia di Kabupaten Pematang; Untuk mengetahui keefektifan anggaran terkait program-program Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Teori-teori yang dipakai penulis sebagai pisau analisis antara lain pembangunan manusia, *Pro Poor Budgeting*, dan Evaluasi kebijakan. Pembangunan Manusia terdapat tiga pilar dalam pembangunan manusia itu sendiri yakni kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Indikator-indikator sebagai pembentuk indeks yang dipilih sebagai berikut (Mudrajad Kuncoro, 2006:30) : a. Angka Harapan Hidup, b. Rata-rata Lama Sekolah, c. Angka Melek Huruf, d. Daya Beli.

Sedangkan secara konseptual anggaran *Pro Poor Budgeting* merupakan bagian (turunan) dari kebijakan yang berpihak kepada kaum miskin (*pro poor policy*) (Waidl sudjito dan Bahagijo, 2008:29). Oleh karena itu, untuk membandingkan anggaran tersebut sudah terealisasi dengan baik digunakan cara perhitungan sebaran anggaran dengan menggunakan rumus sebagai berikut (Waidl sudjito dan Bahagijo, 2008:104):

$$\frac{\text{Alokasi dana pos tertentu}}{\text{Total anggaran}} \times 100$$

Evaluasi merupakan kegiatan untuk menilai tingkat kinerja suatu kebijakan (subarsono, 119:2012). Sehingga dari pendapat diatas bahwa evaluasi kebijakan diartikan sebagai sebuah kegiatan untuk melihat out come dalam sebuah kebijakan dan melihat hasil yang dicapai dalam pelaksanaannya. Sehingga bisa diperoleh kebijakan baru yang lebih baik. Dimana dalam penelitian ini peneliti memilih teori menurut Mazmania dan Sabatier yang menitikberatkan pada variable tertentu. Oleh karena itu, didalam evaluasi

ini difokuskan pada evaluasi lingkungan implementasi kebijakan , khususnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Adapun metode yang digunakan adalah tipe metode evaluasi dan analisis deskriptif. Dengan menggunakan pendekatan Kuantitatif. Dimana pendekatan kuantitatif merupakan pendekatan ilmiah terhadap pengambilan keputusan manajerial dan ekonomi (Mudrajat Kuncoro, 2001).

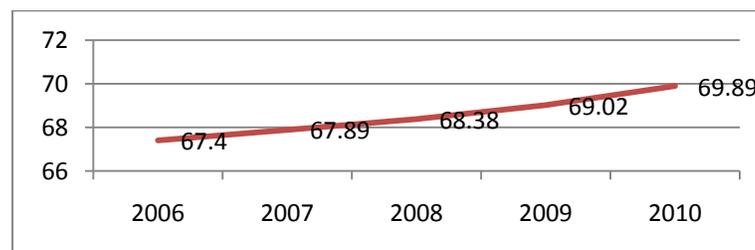
Cangkupan evaluasi di dalam menganalisis Indeks Pembangunan Manusia dilakukan dengan pendekatan kualitatif di Kabupaten Pemalang dengan melakukan wawancara kepada kepala Bappeda, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas tenaga kerja dan transmigrasi, Bidang Perekonomian, RSUD, Dokter, Bidan dan Kepala Sekolah.

B. PEMBAHASAN

B.1 Strategi Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia

Penyusunan Indeks Pembangunan Manusia atau *Human Development Indeks* sangat penting dilakukan di dalam suatu daerah maupun Negara. Hal ini guna mengetahui keberhasilan pembangunan manusia di suatu daerah. Dengan adanya sebuah perhitungan IPM akan diketahui seberapa besar kemampuan dan kemajuan daerah tersebut dalam bidang pembangunan, khususnya pembangunan manusia itu sendiri. Sama halnya dengan Kabupaten Pemalang , dimana gambaran peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari tahun 2006 – 2007 dapat dilihat pada grafik sebagai berikut:

Grafik B.1
Indeks Pembangunan Manusia Di Kabupaten Pemalang
Tahun 2006- 2010



Sumber :Bappeda Kabupaten Pemalang Tahun 2010

Grafik B.1. bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Pemalang tahun 2010 sebesar 69,89. Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten pemalang dari tahun 2006 sampai 2010 cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya, 67,4 pada tahun 2006 menjadi sebesar 69,89 di tahun 2010. Dengan rata-rata peningkatan setiap tahunnya sebesar 0,62 poin.

Walaupun mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, Indeks pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Pemalang masih tergolong menengah atas dari daerah lainnya di Jawa Tengah. Seperti yang kita ketahui, UNDP membagi tingkat status Pembangunan Manusia ke dalam empat golongan yaitu rendah (IPM kurang dari 50), menengah atas (IPM antara 66 s.d 80), menengah bawah (IPM antara 50 s.d 66), dan tinggi (IPM di atas 80). Hal ini bisa terlihat dari perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Pemalang dan kabupaten/kota disekitarnya sebagai berikut:

Tabel B.1
Indeks Pembangunan Manusia Di Kabupaten Pemalang
Dan Wilayah Sekitarnya tahun 2006-2010

NO	Wilayah	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)					Status Pembangunan Manusia
		2006	2007	2008	2009	2010	Tahun 2010
1	Kota Tegal	72,4	72,72	73,2	73,63	73,89	Menengah Atas
2	Kota Pekalongan	72,5	73,1	73,49	74,01	74,47	Menengah Atas
3	Kabupaten Banyumas	70,8	70,8	71,8	72,27	72,6	Menengah Atas
4	Kabupaten Purbalingga	69,9	69,9	70,9	71,51	72,07	Menengah Atas
5	Kabupaten Pekalongan	69,4	69,9	70,9	71,51	72,07	Menengah Atas
6	Kabupaten Tegal	67,8	68,83	69,54	70,08	70,59	Menengah Atas
7	Kabupaten Pemalang	67,4	67,89	68,38	69,02	69,89	Menengah Atas
8	Kabupaten Brebes	65,9	66,57	67,08	67,69	68,2	Menengah Atas
JUMLAH		70,3	70,92	71,6	72,1	72,49	Menengah Atas

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah tahun 2006-2010

Berdasarkan Tabel B.1. jika dibandingkan dengan Kabupaten sekitarnya, nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Pemalang lebih tinggi dibandingkan dengan Kabupaten Brebes, namun masih jauh dibawah dari Kabupaten yang lainnya. Walaupun demikian dalam tabel di atas Kabupaten Pemalang masuk pada golongan Menengah Atas menurut perhitungan nilai dai UNDP yang berkisar antara 66 s.d 80, dimana pada tahun ke tahun Kabupaten

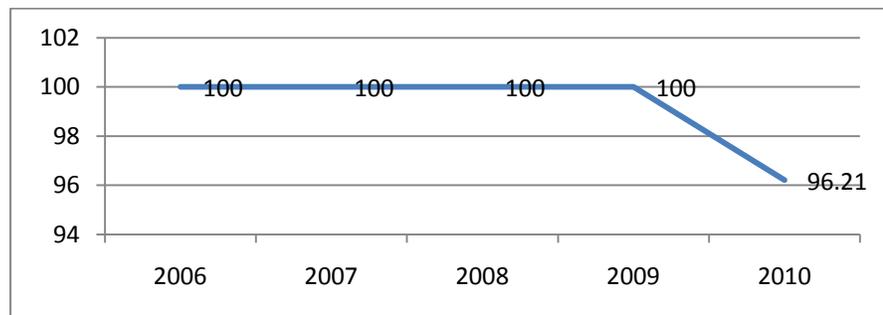
Pemalang selalu dalam nilai tersebut. Hal ini menunjukkan status pencapaian Kabupaten Pemalang sama dengan capaian Kabupaten lainnya, khususnya daerah-daerah tetangga seperti Kabupaten Tegal (70,59), Kabupaten Pekalongan (72,07) dan Kabupaten lainnya.

Strategi peningkatan yang dilakukan oleh pemerintah terkait Indeks Pembangunan Manusia itu sendiri. Dimana salah satu dari masing-masing indikator memiliki strategi peningkatan masing-masing diantaranya sebagai berikut:

1. Peningkatan Angka Harapan Hidup

- Mengurangi persentase Bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah melalui optimalisasi peran petugas puskesmas pembantu, petugas puskesmas, bidan desa, kader posyandu, dan pengurus PKK dalam meningkatkan kesadaran ibu hamil dalam pemeriksaan kehamilan, dan meningkatkan pelayanan bayi dengan berat badan rendah di puskesmas, puskesmas pembantu, dan rumah sakit. Disamping itu juga perlu project pengembangan desa sadar gizi dan BBLR.

Grafik B.2
Persentase Bayi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) Ditangani Di Kabupaten Pemalang Tahun 2006 – 2010



Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang (2006-2010)

2. Peningkatan Rata-rata lama sekolah

- Meningkatkan akses pelayanan pendidikan bagi seluruh penduduk usia sekolah melalui pendidikan secara gratis (bebas SPI dan SPP) pada jenjang pendidikan dasar (SD/MI dan SMP/MTs) dengan menggunakan dana BOS.

Tabel B.2
APK Dan APM Jenjang SD/MI Dan SMP/MTs Di Kabupaten
Pemalang Tahun 2006-2010

Tahun	Jenjang Pendidikan			
	APM		APK	
	SD/MI	SMP/MTs	SD/MI	SMP/MTs
2006	105,28	74,84	93,67	24,79
2007	122,06	77,49	101,68	27,37
2008	114,84	91,58	95,98	31,11
2009	121,01	96,02	97,27	38,40
2010	120,77	102,80	107,14	45,70

Sumber :Disdikpora Kabupaten pemalang (2006-2010),diolah

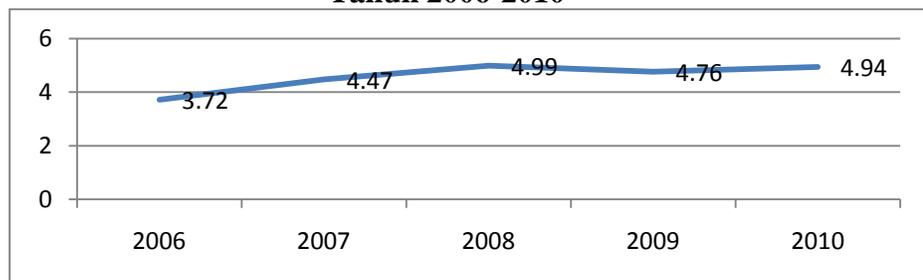
3. Peningkatan Angka Melek Huruf

- Mengurangi masyarakat buta huruf melalui program pendidikan keaksaraan (pendidikan keaksaraan fungsional, keaksaraan keluarga, keaksaraan usaha mandiri, dan pendidikan keaksaraan dengan menggunakan bahasa ibu) dengan memberdayaan organisasi yang ada di dalam masyarakat seperti LSM, Ormas, dan PKBM untuk berpartisipasi.

4. Peningkatan Daya Beli

- Meningkatkan akses pada masyarakat dalam mengembangkan usaha melalui pembangunan infrastruktur dan sarana perekonomian, terutama sarana perdagangan secara merata di seluruh wilayah Kabupaten Pemalang.

Grafik B.3
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pemalang (%)
Tahun 2006-2010



Sumber : BPS Kabupaten Pemalang (2006-2010)

Dilihat dari visi misi bupati pemalang yang akan diukur menggunakan indikator kunci sebagai berikut:

Tabel B.3

Matrik Indikator Kunci Capaian Visi Misi Kabupaten Pemalang

Tujuan Dan Sasaran	Indikator Kunci Capaian Visi Misi
1. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan pelayanan kesehatan yang berkualitas	
a. Menurunkan AKI, AKB dan Balita gizi buruk dan kurang	Angka Kematian Ibu (per 100.000 KLH) Angka Kematian Bayi (per 1000 KLH)
b. Meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin	Angka kematian Balita (per 1000 KLH) Persentase Balita Gizi Buruk (%)
c. Menurunnya angka kesakitan menular terutama DB, HIV AIDS, dan TB	Angka Kesakitan (DB, TB, HIV AIDS)
d. Meningkatnya kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan sesuai kebutuhan	
e. Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan	
2. Meningkatkan perlindungan sosial	
a. Meningkatkan kualitas tenaga kerja dan penempatan tenaga kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%) Tingkat Pengangguran Terbuka (%)
b. Meningkatkan kerjasama antar daerah dalam penempatan transmigrasi	Jumlah transmigrasi yang diberangkatkan ke lokasi transmigrasi (KK)
3. Memperluas kesempatan memperoleh pendidikan dan meningkatkan kualitas pendidikan secara merata	
a. Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana pada semua jenjang pendidikan	Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik (%)
b. Meningkatnya keterjangkauan pelayanan pendidikan secara merata dis seluruh wilayah	APM PAUD (%)
	APM SMP/MTs/Paket B (%)
	APM SMA/SMK/MA/paket C (%)
	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI (%)
	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs (%)
	Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA (%)
c. Meningkatnya kualitas dan relevansi pendidikan pada semua jenjang pendidikan termasuk kualitas pendidik dan tenaga kependidikan	Angka kelulusan (AL) SD/MI (%)
	Angka kelulusan (AL) SMP/MTs (%)
	Angka kelulusan (AL) SMA/SMK/MA (%)
d. Meningkatnya keterjaminan pelayanan pendidikan pada semua jenjang pendidikan	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV (%)
	Persentase sarana prasarana sesuai standar jenjang SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/SMK/MA

Sumber: Perda Nomor 5 Tahun 2011 tentang RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2011-2016

Berdasarkan tabel B.3 diatas menjelaskan terkait dengan target dan sasaran dimulai dari kesehatan, tenaga kerja , dan pendidikan. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan pembangunan di daerah Kabupaten Pemalang. Sehingga focus pada hal yang sudah direncanakan dan tidak meleset dari target maupun visi misi Kabupaten Pemalang.

Dari perhitungan alokasi anggaran APBD diperoleh persentase pendidikan sebesar 58 %, kesehatan 10 % dan Pekerjaan Umum sebesar 7 %. Anggaran APBD yang pengalokasiannya terbesar terdapat di dalam pendidikan, yakni sebesar 58 % namun bila lebih dirinci dana yang digunakan langsung dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Pemalang hanya 1,1% (Rp.12.810.000.000 dari Rp.699.238.429.000), dimana anggaran idealnya 20 %. Sehingga hasil peningkatan di bidang pendidikan dalam Indeks Pembangunan Manusia tergolong rendah.

Sedangkan pada indikator kesehatan dan pekerjaan umum dengan jumlah anggaran yang kecil dibandingkan pendidikan, juga sebagai salah satu faktor memicu rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Hal ini terlihat dengan pemakaian anggaran yang langsung kepada masyarakat hanya 1,8% (Rp.21.112.300.000) dari 11% (Rp.127.636.899.000) dana yang dianggarkan. Dimana peningkatan kesehatan dalam angka harapan hidup kabupaten pemalang mencapai 68,79 %. Kemudian pencapaian dalam daya beli yakni Rp. 635.260,00 sedangkan rata-rata kebutuhan masyarakat Kabupaten Pemalang Rp.765.622. hal ini dipicu oleh penggunaan dana yang hanya 1 % (Rp. 8.948.600.000) dari 7% (Rp.127.636.899.000). oleh karena itu, memicu rendahnya nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Pemalang dibandingkan dengan Kabupaten lainnya khususnya Kabupaten sekitarnya seperti Tegal dan Pekalongan.

Adapun manfaat bila dilihat dari program-program yang telah dirancang sedemikian rupa oleh Pemerintah Kabupaten Pemalang, diantaranya adalah :

1. Terjangkaunya akses pelayanan kesehatan dengan bertambahnya jumlah tenaga kerja dan jumlah rumah sakit yang memadai
2. Adanya program jampersal yang dilakukan di setiap Desa ataupun Kelurahan dimulai pada tahun 2010 diharapkan akan mengurangi angka kematian ibu dan anak sehingga masyarakat dapat langsung mendapat pertolongan
3. Masyarakat tidak akan membingungkan biaya lagi karna akan dibantu oleh pemerintah dengan adanya jaminan kesehatan
4. Keterjangkauan sarana dan prasarana pendidikan di wilayah Kabupaten Pemalang akan mempermudah masyarakat dalam menempuh pendidikan

5. Adanya perpustakaan mendorong masyarakat untuk mudah mendapatkan informasi
6. Ringannya biaya pendidikan dibantu oleh dana BOS dan Beasiswa bagi masyarakat Pemalang
7. Adanya program PKK dalam penuntasan buta aksara membuat masyarakat lebih mudah dalam belajar membaca dan menulis
8. Masih terdapat lahan untuk dikelola menjadi lahan pertanian bagi masyarakat
9. Potensi Sumber Daya Alam di Pemalang akan mendorong masyarakat untuk melakukan peluang usaha dalam bidang tertentu misalnya perkebunan, perikanan, ataupun perdagangan.
10. Adanya kawasan industri yang nanti akan menjadi peluang untuk masyarakat Pemalang bekerja atau menjadi lapangan kerja masyarakat.

Adapun sosialisasi yang dilakukan oleh masing-masing instansi terkait adalah sebagai berikut (Perda Nomor 5 Tahun 2011 tentang RPJMD Kabupaten Pemalang) :

1. Dinas Kesehatan

Dari dinas kesehatan yang dilakukan baru-baru ini dengan melakukan sosialisasi jampersal yang tidak hanya oleh kedinasan tetapi juga dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pemalang kepada semua Kepala Desa dan Kelurahan di wilayah Kabupaten Pemalang.

2. Dinas Pendidikan , Pemuda, Dan Olah Raga

Adanya peningkatan pelayanan dan memberikan informasi kepada siswa siswi sekolah baik dasar, pertama maupun menengah terkait dengan pembiayaan dengan adanya BOS dan Beasiswa

3. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Di dalam upaya peningkatan Sumber Daya Manusia sebagai tenaga kerja di kabupaten Pemalang tahun 2006-2010 sesuai didalam RPJMD Kabupaten Pemalang sudah diadakan pelatihan 3 kali dengan jumlah peserta 60 orang untuk diklat tenaga kerja di tahun 2010. Sedangkan diklat untul pegawai di bidang ketenagakerjaan sudah diadakan 3 diklat dengan 3 peserta di tahun

2010, serta penambahan jumlah kerja dari tahun 2009 berjumlah 32 di tahun 2010 menjadi 37 buah.

Dirumuskan kebijakan strategis dan prioritas yang sudah dilaksanakan diantaranya (perda no 5 tahun 2011):

1. Implementasi badan pelayanan layanan umum daerah rumah sakit umum daerah (BLUD RSUD)

Sejalan dengan tuntutan peningkatan pelayanan bidang kesehatan khususnya di rumah sakit, maka diperlukan perbaikan manajemen pengelolaan pelayanan kesehatan dalam bentuk implementasi badan layanan umum daerah RSUD yang direncanakan akan dilaksanakan pada awal tahun 2012.

2. Pengembangan sarana dan prasarana penunjang RSUD serta puskesmas unggulan

Pengembangan sarana dan prasarana penunjang RSUD serta puskesmas unggulan sekaligus pengembangan puskesmas rawat inap akan dilaksanakan secara bertahap pada tahun 2014 dan 2015. Sarana dan prasarana meliputi peralatan medis yang penting untuk pelayanan dasar kesehatan di puskesmas dan rumah sakit umum daerah.

3. Pemantapan proporsi sekolah menengah kejuruan dan sekolah menengah umum

Meningkatkan dengan proporsi 60:40 antara SMK dan SMA. Implementasinya sebagai berikut dengan membangun SMK baru pada tahun 2013, 2014, dan 2015, serta penambahan ruang kelas baru pada SMK setiap tahun minimal 3 RKB.

4. Pemantapan prasarana dan sarana dasar ke PU an (PSD PU)

Kebijakan ini dalam bentuk rehabilitasi berupa jalan, jembatan, dan sarana perhubungan akan dilaksanakan pada tahun 2012 dan 2013 yang diharapkan dapat mengkaver lebih dari 90 % dari jumlah dan panjang sarana dan prasarana tersebut. Sedangkan 2 tahun berikutnya adalah optimalisasi pemeliharaan sarana dasar tersebut.

5. Optimalisasi pengelolaan lampu penerangan jalan umum (LPJU)

Kebijakan ini akan ditempuh dengan meningkatkan koordinasi baik di tingkat regional PLN provinsi. Area pelayanan jaringan (APJ) di Tegal maupun Unit pelayanan jaringan di Kabupaten Pemalang yang tersebar di 4 lokasi.

6. Pengembangan mina dan agropolitan

Guna mengembangkan potensi laut dan darat maka diperlukan pengembangan konsep minapolitan dengan peningkatan kualitas dan kuantitas produk serta kemudahan akses informasi pemasaran.

7. Revitalisasi pertanian

Peningkatan produk pertanian sebagai salah satu basis perekonomian Kabupaten Pemalang mensyaratkan peningkatan peran penyuluh pertanian lapangan sebagai garda terdepan dalam peningkata produksi pertanian. Kebijakan kongkrit yang akan dilaksanakan adalah dengan pembangunan, rehabilitas, dan pemeliharaan kantor balai penyuluhan pertanian di setiap kecamatan, upaya pemberian insentif dan disinsentif bagi PPL, penyediaan data dan informasi serta upaya peningkatan akses pasar di tahun 2012 dan 2014.

8. Integrasi kurikulum budi pekerti dalam semua jenjang pendidikan

Kebijakan yang akan dilakukan untuk mendukung hal tersebut adalah dengan regulasi di bidang pendidikan untuk meningkatkan muatan lokal tentang budi pekerti, pendidikan moral dan nilai-nilai luhur pancasila.

Adapun kebijakan yang sedang dilakukan sebagai berikut (perda no 5 tahun 2011):

1. Kebijakan pengelolaan keuangan daerah
2. Kebijakan pengelolaan sumberdaya aparatur dan kelembagaan
3. Pembangunan pusat perdagangan beras regional
4. Pengendalian ahli fungsi lahan
5. Manajemen usaha kecil menengah
6. Insentif pengembangan investasi daerah
7. Pemenuhan sarana kebutuhan dasar listrik perdesaan

B.2 Kemampuan Institusi Pelaksana

B.2.1 Internal

1. Konsistensi tujuan

Dalam menyelaraskan komitmen bersama dari berbagai instansi di Kabupaten Pemalang serta menjadi acuan pembuatan program-program baik dalam pembangunan maupun non-pembangunan terpacu dalam visi misi bupati kabupaten Pemalang, sebagai berikut:

Visi

Kabupaten Pemalang yang sehat, cerdas, berdaya saing dan berakhlak mulia

Misi

1. Meningkatkan kesehatan masyarakat dan jaminan sosial
2. Meningkatkan pendidikan dan ketrampilan berbasis kompetensi
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan prima, peningkatan investasi dan daya saing daerah
4. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui perkuatan ekonomi kerakyatan berbasis pertanian, perdagangan, dan jasa serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM)
5. Meningkatkan prasarana-sarana dasar dan ekonomi guna mengembangkan sinergi sentra-sentra produksi diperdesaan. Mengembangkan kehidupan beragama yang aman, damai, harmonis, toleran dan saling menghormati

Dari visi misi bupati Kabupaten Pemalang akan menjadikan turunan di sebuah program suatu Daerah. Apalagi dengan adanya visi Bupati terkait “ Kabupaten pemalang yang sehat, cerdas, berdaya saing, dan berakhlak mulia”, ini termasuk dalam indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

2. Ketepatan alokasi sumber daya

Porposisi penggunaan anggaran melalui belanja daerah Kabupaten Pemalang dikelompokkan menjadi belanja langsung dan belanja tidak langsung. Kebijakan anggaran dalam kurun waktu 4 tahun (2006-2010) secara ringkas sebagai berikut (perda no 5 tahun 2011):

- a. Pada APBD tahun anggaran 2006 belanja daerah diarahkan untuk peningkatan pelayanan dasar, khususnya pelayanan kesehatan dan pendidikan; penanggulangan kemiskinan dengan peningkatan taraf hidup

penduduk miskin; peningkatan sarana dan prasarana fisik; peningkatan kinerja aparat yang berkualitas, professional, dan berjiwa pelayanan prima; peningkatan pemanfaatan potensi sumber daya alam secara berkesinambungan; dan peningkatan ketertiban dan keamanan. Target belanja sebesar Rp. 648.133.929.000,00 terealisasi sebesar Rp. 583.144.513.242,00 (89,97 %). Terdiri dari belanja langsung Rp. 307.356.335.156,00 dan tidak langsung Rp. 275.788.178.086,00.

- b. Pada APBD tahun anggaran 2007 belanja daerah diarahkan untuk peningkatan pelayanan dasar khususnya pelayanan kesehatan dan pendidikan; pemberantasan kemiskinan dengan peningkatan taraf hidup penduduk miskin; peningkatan sarana dan prasarana fisik; peningkatan kinerja aparat yang berkualitas, professional, dan berjiwa pelayanan prima; dan peningkatan ketertiban dan keamanan. Target belanja sebesar Rp.742.496.570.000,00 terealisasi sebesar Rp. 651.124.068.777,00 (87,69 %). Terdiri dari belanja langsung Rp. 278. 159.185.941,00 dan tidak langsung Rp. 363.964.882.736,00.
- c. Pada APBD tahun anggaran 2008 belanja daerah diarahkan untuk peningkatan pelayanan dasar khususnya pelayanan kesehatan dan pendidikan; pemberantasan kemiskinan dengan peningkatan taraf hidup penduduk miskin; peningkatan sarana dan prasarana fisik; peningkatan kinerja aparat yang berkualitas, professional, dan berjiwa pelayanan prima; dan peningkatan ketertiban dan keamanan. Target belanja sebesar Rp.831.478.450.000,00 terealisasi sebesar Rp. 767.167.955.591,00 (92,27 %) . Terdiri dari belanja langsung Rp.285.510.917.614,00 dan tidak langsung Rp. 481.657.037.977,00.
- d. Pada tahun anggaran 2009, belanja daerah diarahkan pada peningkatan porsi belanja untuk peningkatan pelayanan dan kepentingan public termasuk optimalisasi tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*), pengentasan kemiskinan berupa jaminan kesehatan masyarakat miskin, perluasan akses terhadap pendidikan maupun pengembangan infrastruktur jalan/jembatan dan sarana perdesaan serta

pendampingan pengentasan dan antisipasi bencana alam disamping tetap menjaga eksistensi penyelenggaraan pemerintahan yaitu dengan peningkatan dan pengembangan asset daerah. Target belanja Rp. 893.747.833.500,00 dengan realisasi sebesar Rp. 843.963.261.570,00. Terdiri dari belanja langsung Rp. 291.918.833.520,00 dan belanja tidak langsung Rp. 552.044.383.050,00.

- e. Pada APBD tahun anggaran 2010, belanja diarahkan untuk peningkatan kinerja pemerintah daerah diikuti kinerja aparat yang berkualitas, professional dan berjiwa pelayanan prima dalam upaya mendukung tercapainya sasaran yang tertib, aman, dan damai; peningkatan pertumbuhan ekonomi investasi, perluasan kesempatan kerja dan penguatan kemiskinan; peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan; dan peningkatan kualitas pelayanan infrastruktur dan pemerataan antar wilayah. Target belanja sebesar Rp.1.005.074.569.000,00 dengan realisasi Rp.928.713.828.281,00. Terdiri dari belanja langsung Rp.244.480.693.931 dan tidak langsung Rp.684.233.134.350,00.

3. Keterpaduan hierarki dalam dan diantara lembaga pelaksana

Keterpaduan di dalam pelaksanaan kebijakan itu sangat penting. Dimana koordinasi antara satu dengan yang lain baik secara vertical maupun horizontal harus tetap terjaga. Dalam menunjang peningkatan Indeks pembangunan Manusia sangat penting adanya keterpaduan tersebut, karena didalam indikator-indikatornya terkait dengan kedinasan:

- a. Kesehatan. Terkait dengan Angka Harapan Hidup yang difokuskan pada ibu dan anak, yang mana hal ini terkait dengan Dinas Kesehatan. Disini hubungan pun terjalin mulai dari pendanaan sampai realisasi di lapangan seperti RSUD, puskesmas, puskesmas pembantu, ibu PKK dalam imunisasi, dan lain sebagainya.
- b. Pendidikan. Dimana di dalam pendidikan terdapat 2 kategori yakni Rata-rata lama sekolah dan Angka Melek Huruf. Disini keterkaitan juga dengan

dinas pendidikan, yang berhubungan langsung dengan pelayanan pendidikan khususnya sekolah baik formal maupun non formal.

- c. Ekonomi. Dimana menitikberatkan didalam daya beli. Sesuai dengan indikator pasti terkait dengan lapangan kerja, daya saing, wirausaha, dan lain-lain. Hal ini keterkaitan dengan Dinas sosial, tenaga kerja dan transmigrasi.

4. Aturan-aturan dari badan pelaksana

Indeks Pembangunan Manusia merupakan persatuan dari beberapa indikator didalamnya, dari pendidikan, kesehatan, dan daya beli. Adapun peraturan di dalam pelaksanaan program terkait pembangunan manusia di Kabupaten Pematang Jaya yang diutarakan oleh kepala Bappeda, Bapak Arifin (kantor bappeda, 27 September 2013), diantaranya sebagai berikut:

- f. Undang-undang Nomor 25 Nomor 2000 tentang program pembangunan nasional (propenas) 2000-2004
- g. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah
- h. Undang-undang Nomor 25 tahun 2000 Tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan propinsi sebagai daerah otonom
- i. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah
- j. Undang-undang Nomor 16 tahun 1967 tentang statistik

5. Analisis SWOT terkait pembangunan manusia

Analisis faktor – faktor dalam peningkatan capaian Indeks Pembangunan Manusia dengan menggunakan analisis SWOT. Dimana dilihat dari kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Kekuatan

- a. Angka Harapan Hidup Kabupaten Pematang Jaya
 - Jumlah alokasi anggaran yang didistribusikan dalam bidang kesehatan sudah memadai

- Adanya ketersediaan prasarana kesehatan dan rujukan cukup memadai dengan RSUD 1 unit, Rumah sakit swasta 3 unit, rumah sakit bersalin 10 unit, dan lain sebagainya
 - Jumlah tenaga yang cukup memadai dimulai dari bidan yang berjumlah 430 orang, perawat 510 orang, dokter umum 104 orang, dokter spesialis 26 orang, tenaga kesmas 36 orang dan tenaga sanitasi 39 orang.
 - Jumlah posyandu yang memadai kurang lebih 70 % posyandu aktif
- b. Rata-Rata Lama Sekolah Dan Angka Melek Huruf Kabupaten Pemalang
- Jumlah alokasi dana yang sudah memadai
 - Ketersediaan sarana prasarana pendidikan dasar dan menengah yang cukup memadai yaitu 779 unit SD/MI, 102 unit SMP/MTs, dan 27 unit SMA/MA/SMK
 - Jumlah tenaga kerja yang memadai
 - Jumlah perpustakaan yang cukup memadai sebanyak 482 unit.
- c. Daya Beli Kabupaten Pemalang
- Potensi sumber daya alam yang besar seperti pertanian, perikanan, pariwisata dan bahan galian
 - Rata-rata pertumbuhan ekonomi berkisar antara 3,72 % hingga 4,49 % dari tahun 2006-2010
 - UMKM cukup banyak yaitu 7.992 unit
 - Telah ditetapkannya kawasan industri seluas 40 Ha untuk menunjang investasi
2. Kelemahan
- a. Angka Harapan Hidup Kabupaten Pemalang
- Masih rendahnya kesadaran ibu hamil dalam pemeriksaan kehamilan dan kurang optimalnya dalam penanganan bayi berat lahir rendah
 - Kurangnya kemampuan pembiayaan kelahiran dan kebiasaan masyarakat menggunakan jasa dukun bayi saat melahirkan
 - Masih rendahnya pemeriksaan kesehatan bayi neonates resiko tinggi

- Kurang optimalnya penanganan ibu hamil resiko tinggi
 - Kemiskinan yang menyebabkan masih adanya bayi dengan gizi buruk dan rendahnya terjangkau imunisasi untuk anak
- b. Rata-Rata Lama Sekolah Dan Angka Melek Huruf Kabupaten Pemalang
- Biaya yang kurang terjangkau, terlebih untuk masyarakat kurang mampu sehingga mengakibatkan adanya kesadaran akan pendidikan mereka lebih baik mencari uang disbanding mengeluarkan uang untuk pendidikan.
 - Kurangnya kemampuan financial yang dimiliki sebagian masyarakat (masyarakat miskin) dan kuangnya minat dari anak
 - Masih banyaknya guru yang tidak layak mengajar
 - Perguruan tinggi di pemalang jarang diminati
 - Kesadaran masyarakat rendah dalam mengesah kemampuan membaca
 - Kurangnya ketuntasan membaca dikarenakan kemauan peserta didik yang kurang
 - Rendahnya minat baca di dalam masyarakat
- c. Daya Beli Kabupaten Pemalang
- Terbatasnya akses masyarakat dalam mengembangkan usaha disebabkan kurang meratanya pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana perekonomian
 - Rendahnya capaian realisasi investasi dalam menunjang kesempatan kerja
 - Rendahnya kualitas tenaga kerja
 - Pendapatan per kapita masyarakat rendah
3. Peluang/Kesempatan
- a. Angka Harapan Hidup Kabupaten Pemalang
- Berkembangnya ilmu pengetahuan di bidang kesehatan yang diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat

- Meningkatkan komitmen dan dukungan pemerintahan dalam penyediaan yakni jamkesmas dan jampersal
 - Meningkatkan akses informasi kesehatan
 - b. Rata-Rata Lama Sekolah Dan Angka Melek Huruf Kabupaten Pematang
 - Tingginya komitmen dan dukungan pemerintah pusat dalam pembangunan di bidang pendidikan
 - Kebijakan provinsi vokasi dan proposi SMK:SMA 70:30,
 - Meningkatnya kepedulian dunia usaha terhadap pendidikan dalam bentuk beasiswa
 - c. Daya Beli Kabupaten Pematang
 - Meningkatnya iklim usaha yang semakin kondusif dan stabilitas politik nasional dan daerah semakin baik
 - Berlakunya pasar bebas ASEAN-China (C-AFTA) yang mendorong peningkatan perdagangan skala kecil
 - Meningkatnya sebuah komitmen dan dukungan dalam upaya percepatan tujuan pembangunan Millenium (MDG's) terkait dengan Indeks Pembangunan Manusia
4. Ancaman
- a. Angka Harapan Hidup Kabupaten Pematang
 - Adanya kasus- kasus kejadian luar biasa yang menyebabkan kematian seperti keracunan makanan atau minuman dan kecelakaan
 - Masih rendahnya informasi terkait jaminan kesehatan untuk masyarakat miskin
 - Munculnya berbagai penyakit yang membutuhkan biaya besar seperti kanker dan sejenisnya
 - b. Rata-Rata Lama Sekolah Dan Angka Melek Huruf Kabupaten Pematang
 - Adanya persepsi terkait dengan pembiayaan sekolah yang mahal yang mengakibatkan orang tua enggan menyekolahkan anaknya

- c. Daya Beli Kabupaten Pemalang
 - Meningkatnya persaingan pasar baik lokal maupun produk luar
 - Pegurangan cadangan pangan karna disebabkan iklim yang tidak menentu.

B.2.1 Eksternal

1. Kondisi topografi daerah

Secara topografi (keadaan daerah) Kabupaten Pemalang terdiri dari 4 kategori, yaitu sebagai berikut (BPS Kabupaten Pemalang: 2012) :

1. Daerah dataran pantai yaitu daerah yang memiliki ketinggian rata-rata antara 1 – 5 meter diatas permukaan air laut (DPL). Daerah ini meliputi 18 desa dan 1 kelurahan yang terletak di bagian utara.
2. Daerah dataran rendah yaitu daerah yang memiliki ketinggian rata-rata antara 6 – 15 meter DPL yang meliputi 94 desa dan 4 kelurahan di bagian selatan dari wilayah pantai.
3. Daerah dataran tinggi yaitu daerah yang memiliki ketinggian rata-rata antara 16 – 212 meter DPL yang meliputi 35 desa, terletak di bagian tengah dan selatan.
4. Daerah pegunungan. Daerah yang terbagi menjadi 2 bagian yaitu :
 - a) Daerah dengan ketinggian antara 213-924 meter di atas permukaan laut, meliputi 55 desa yang terletak dibagian selatan.
 - b) Daerah ketinggian 925 meter di atas permukaan laut yang terletak di bagian selatan. Daerah ini meliputi 10 desa dan berbatasan langsung dengan kabupaten purbalingga.

Dari kondisi Kabupaten Pemalang yang dilihat secara topografi, daerahnya juga terbagi menjadi 2 bagian yakni daerah selatan dan timur. Dimana daerah selatan daerah dataran tinggi yang lebih ke pegunungan. Sedangkan daerah timur lebih pada kawasan industri. Dari data yang diperoleh dari Bappeda kawasan industri diantaranya sebagai berikut:

- a. Desa Lawangrejo Kecamatan Pemalang
- b. Desa Kedungbanjar Kecamatan Taman
- c. Desa Pesucen Kecamatan Petarukan
- d. Desa Jatirejo Kecamatan Ampelgading

Sedangkan bila dilihat daerah selatan identik dengan sektor pertanian bahkan ada yang belum terjangkau listrik di daerah selatan. Hal ini juga diuraikan oleh Bapak aji selaku kepala perencanaan (kantor Bappeda, 2 Desember 2013:07.49 WIB):

“ masih ada wilayah yang belum terjangkau listrik, seperti di Kecamatan Pulosari. Tapi ini bukan Desa melainkan Dukuh, disana pengaliran listrik masih ngeblok-ngeblok”

Perbedaan tersebut membuktikan bahwa pembangunan belum merata di Kabupaten Pemalang. Dimulai dari kawasan industri, bahkan pembangunan pendidikan lebih cenderung dipusatkan di daerah tengah ke timur. Walaupun daerah selatan dilakukan perbaikan jalan dan penambahan sekolah SMK. Masih saja daerah selatan belum tersedia pembangunan sarana dan infrastruktur yang memadai.

2. Dukungan publik

Kebijakan yang memberikan insentif biasanya mudah mendapatkan dukungan publik. Sebaliknya kebijakan yang bersifat dis-intensif, seperti kenaikan harga BBM atau kenaikan pajak akan kurang mendapat dukungan publik.

Hal tersebut terlihat dari manfaat dari program-program yang telah dirancang sedemikian rupa oleh Pemerintah Kabupaten Pemalang, diantaranya adalah :

1. Terjangkaunya akses pelayanan kesehatan dengan bertambahnya jumlah tenaga kerja dan jumlah rumah sakit yang memadai
2. Adanya program jampersal yang dilakukan di setiap Desa ataupun Kelurahan dimulai pada tahun 2010 diharapkan akan mengurangi angka

kematian ibu dan anak sehingga masyarakat dapat langsung mendapat pertolongan

3. Masyarakat tidak akan membingungkan biaya lagi karna akan dibantu oleh pemerintah dengan adanya jaminan kesehatan
4. Keterjangkauan sarana dan prasarana pendidikan di wilayah Kabupaten Pemalang akan mempermudah masyarakat dalam menempuh pendidikan
5. Adanya perpustakaan mendorong masyarakat untuk mudah mendapatkan informasi
6. Ringannya biaya pendidikan dibantu oleh dana BOS dan Beasiswa bagi masyarakat Pemalang
7. Adanya program PKK dalam penuntasan buta aksara membuat masyarakat lebih mudah dalam belajar membaca dan menulis
8. Masih terdapat lahan untuk mengelola menjadi lahan pertanian bagi masyarakat
9. Potensi Sumber Daya Alam di Pemalang akan mendorong masyarakat untuk melakukan peluang usaha dalam bidang tertentu misalnya perkebunan, perikanan, ataupun perdagangan.
10. Adanya kawasan industri yang nanti akan menjadi peluang untuk masyarakat Pemalang bekerja atau menjadi lapangan kerja masyarakat.

B.2.3 Komitmen Pemimpin

Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dibutuhkan adanya tindakan dari para pemimpin yang memiliki tujuan dalam meningkatkan daerahnya. Hal ini juga dilakukan oleh para pemimpin di Kabupaten Pemalang dengan melakukan program-program untuk menunjang pembangunan baik di bidang kesehatan, pendidikan, dan daya beli. Oleh karena itu, perlu adanya komitmen di dalamnya, ditinjau dari pembangunan di bidang-bidang tertentu:

1. Pendidikan

Pendidikan sebagai salah satu tombak dalam pembangunan manusia. Hal ini karna menjadi acuan kualitas Sumber Daya Manusia di kabupaten Pemalang. Seperti kutipan wawancara dari Bappeda Bapak aji (kepala perencanaan, 2 Desember 2013: 07.49):

“ kalau di Bappeda tidak ada organisasi diluar instansi yang ditujukan dalam meningkatkan pembangunan manusia. Hal tersebut saling berkaitan juga pada instansi-instansi lain khususnya dinas pendidikan. Yang sedang dilakukan salah satunya PUS (pendidikan untuk semua) ditujukan pada peningkatan pendidikan baik dasar sampai menengah, melek huruf, kualitas pendidikan, dan lain-lain. Missal organisasi lain ada yang dibina oleh Dinas Pendidikan yakni IMPP (ikatan mahasiswa pemuda pelajar) dikhususkan untuk semua kegiatan terkait dengan mahasiswa, pemuda, dan pelajar akan difokuskan pada organisasi tersebut. Hal ini diharapkan akan membantu generasi muda saling memberi pengertian terkait arti penting pendidikan”

Hal ini menunjukkan bahwa ada komitmen dari pemimpin di kabupaten Pemalang namun masih mengalami stagnansi. Adapun untuk melakukan sebuah trobosan baru yang berbeda dari daerah ,lain belum dilakukan. Sehingga upaya yang dilakukan belum maksimal. Walaupun ada program peningkatan kualitas pendidikan dan penambahan sekolah baik kelas maupun sekolah baru tetap peringkat Kabupaten Pemalang masih di bawah rata-rata Jawa Tengah. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Pemalang belum secara maksimal dalam upaya peningkatan Indeks Pembangunan Manusia tersebut.

2. Kesehatan

Di bidang kesehatan juga penting karna mempengaruhi Angka Harapan Hidup (AHH). Seperti yang disampaikan oleh Bappeda Bapak aji (kepala perencanaan, 2 Desember 2013: 07.49):

“ kalau dibidang kesehatan ya ada pembuatan sanitasi murah. Kita membina masyarakat untuk pembuatan sanitasi lalu dijual kepada

msyarakat dengan harga murah. Kita juga meningkatkan pelayanan dengan pembangunan ruang kelas 3 rawat inap, kalau di RSUD tambahan 22 ruangan baru. Missal organisasi setau saya tidak ada “

Dari uraian diatas dengan tidak adanya organisasi mendukung dalam pembangunan manusia menjadikan komitmen kurang. Sehingga memicu tidak adanya perubahan peringkat serta kematian ibu juga tinggi.

3. Daya beli

Yang dilakukan oleh pemimpi haruslah menjadikan acuan didalam pegawai lainnya. Didalam peningkatan daya beli difokuskan pada Dinas Sosian, tenaga kerja, dan Transmigrasi. Dimana di sana menyelenggarakan kegiatan untuk mengasah pekerja yang lebih baik diambil dari masyarakat. Hal ini dilakukan melalui BLK dengan mengadakan kurshus menjait, las, dan otomotif. Seperti yang diuraikan oleh Kepala Dinas Bapak Sultanto (kantor, 7 oktober 2013: 13.00 WIB):

“ solusinya dengan mengoptimalkan BLK dengan adanya kursus menjahit, las, dan otomotif. Dimana orang yang mengikuti pelatihan diambil dari DEsa-desa di wilayah Kabupaten Pemalang dengn menghubungi Kepala Desa. Lalu ada organisasi diluar instansi LPK (latian pendidikan ketrampilan) dimana dikelola oleh swasta seperti baby sister. Setelah diberi pelatihan kami juga bekerjasama dengan para investor atau perusahaan maupun pabrik sehingga orang tersebut diberi pekerjaan di tempat tersebut. Tidak hanya itu ada program kerja produktif dengan melihat potensi Desa lalu diberikan modal untuk pengembangannya yang dilakukan oleh masyarakat desa itu sendiri. Contohnya produksi grammer. Walau demikian kami tetap melakukan pemantauan. Dimulai dari pendataan, klasifikasi (kebutuhan), lalu mandiri dengan diberi alat kemudian monitoring serta diberi cara pemasaran yang baik”

Sehingga disini terdapat sebuah komitmen. Walaupun dalam faktanya daya beli Kabupaten Pemalang masih rendah. Hal ini juga bisa saja dipicu

daerah dan pembangunan sarana dan prasarana serta investor yang belum maksimal. Sehingga tidak adanya pemerataan di wilayah selatan dan tengah-timur.

C. PENUTUP

C.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis atas data-data dalam penelitian tentang evaluasi kebijakan Pembangunan Manusia Kabupaten Pematang Jaya yang berhasil dikumpulkan dalam penelitian ini, maka dapat diambil tiga kesimpulan sebagai berikut:

Pertama, program Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Pematang Jaya terkait indikator pendidikan, sudah dijalankan melalui program-program dari peningkatan rata-rata lama sekolah dan Angka Melek Huruf dengan adanya pendidikan formal dan non formal serta penambahan fasilitas pendidikan. Namun kendati demikian upaya peningkatan Indeks Pembangunan Manusia dalam meningkatkan Rata-rata lama sekolah dan Angka Melek Huruf belum cukup optimal. Hal ini terbukti dari anggaran pendidikan 58 % yang hanya digunakan langsung kepada masyarakat sebesar 1,1%. Sehingga diperoleh hasil Rata-rata lama sekolah 6,66 dan Angka Melek huruf 90,76. Hal ini menandakan bahwa pengelolaan anggaran kurang optimal. Tidak hanya itu keterpurukan juga dipicu masih adanya kesadaran masyarakat yang kurang, serta pemerintah hanya menjalankan program yang sudah ada baik dari pusat maupun daerah. Walaupun terdapat beberapa organisasi untuk menunjang hal tersebut masih saja peringkat ataupun nilai Indeks Pembangunan Manusia masih di bawah rata-rata Jawa Tengah. Komitmen pemerintah juga kurang, karna tidak ada sebuah terobosan khusus yang berbeda dengan daerah lainnya serta organisasi yang dikhususkan untuk meningkatkan pembangunan manusia itu sendiri walaupun sudah terdapat organisasi binaan yakni IMPP.

Kedua, program Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Pemalang terkait indikator kesehatan. Upaya – upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pemalang khususnya Dinas Kesehatan dalam melakukan program pengurangan Angka Harapan Hidup terkait Angka Kematian Ibu, Bayi, Balita, dan lain sebagainya seperti Jampersal, peningkatan pelayanan kesehatan di rumah sakit, puskesmas, bidan dan lain sebagainya, dan jaminan kesehatan lainnya sesuai yang telah direncanakan di dalam RPJMD. Namun masih saja Angka Kematian Ibu di Kabupaten Pemalang tinggi. Sehingga ini sebagai acuan bahwa komitmen di dalam pemerintah kurang walaupun banyaknya program peningkatan tersebut nilai AHH masih rendah dan juga tidak ada pembentukan sebuah organisasi atau perkumpulan untuk meningkatkan Angka Harapan Hidup secara khusus. Kemudian penambahan ruangan juga dilakukan bila ada program pemerintah pusat maupun daerah saja bukan karna hal mendesak dengan kurangnya kamar untuk pasien. Anggaran juga ikut andil didalamnya yang hanya 11% dan dirasakan langsung untuk masyarakat sebesar 1,8%. Ini sebagai salah satu pemicu terkait peningkatan pelayanan untuk masyarakat, yang nantinya bisa menunjang Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Hal ini dibuktikan rendahnya nilai IPM yang menduduki peringkat ke 34 se Jawa Tengah.

Ketiga, program Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Pemalang terkait indikator Daya beli. Didalam daya beli Kabupaten Pemalang tergolong rendah yakni Rp. 635.260,00. Dimana masih tergolong rendah jauh dari standar UNDP sebesar Rp. 732.720,00. Salah satu pemicunya bisa karna anggaran dana yang langsung untuk masyarakat sebesar 1% dari 7% penganggaran APBD. Walaupun program-program sudah dijalankan namun hasil yang dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Pemalang belum sepenuhnya berhasil atau masih rendah. Salah satu program daerah adalah BLK yang terdapat di Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi di situ masyarakat dilantik untuk melakukan pelatihan cara mengelas, menjahit, dan terkait otomotif yang nanti disalurkan kepada perusahaan atau pun pabrik. Tidak hanya itu Dinas juga bekerjasama dengan pihak swasta dengan mendirikan LPK yang lebih berfokus pada kursus baby sister. Hal tersebut menunjukkan sebuah komitmen di antara pemerintah dan swasta dalam menggali

potensi Sumber Daya Manusia. Namun hal tersebut belum cukup optimal dalam mendorong daya beli di Kabupaten Pemalang.

C.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh, maa diperlukan saran untuk pelaksanaan program Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Pemalang yang lebih baik. Saran tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kesehatan

- a. Membuat program trobosan untuk khusus meningkatkan Angka Harapan Hidup
- b. Pembentukan unit khusus yang melayani pengelolaan kesehatan
- c. Mengembangkan desa siaga aktif dalam menumbuhkan kesadaran ibu terkait dengan kesehatan baik saat kehamilan maupun pasca kehamilan;
- d. Meningkatkan jaminan kesehatan untuk masyarakat Kcamatan Pemalang, khususnya masyarakat miskin;
- e. Mengoptimalkan pelayanan kesehatan di dalam rumah sakit maupun puskesmas setempat serta bidan-bidan desa;
- f. Penambahan penganggaran dana yang langsung dirasakan oleh masyarakat seperti pengobatan, pemeriksaan, dan lain-lain.

2. Pendidikan

- a. Membuat sebuah trobosan program pendidikan untuk mengoptimalkan pelayanan pendidikan yang merata,
- b. Meningkatkan kesadaran masyarakat terkait pentingnya pendidikan untuk anak,
- c. Mengoptimalkan pengadaan beasiswa untuk siswa/siswi di jenjang SMA/SMK/MA;
- d. Mengotimalkan penuntasan keaksaraan dengan melakukan pembelajaran ke desa-desa;
- e. Mengintensifkan penyelenggaraan kejar paket baik kejar paket A, paket B, dan paket C.

- f. Penganggaran yang lebih menitikberatkan pada kebutuhan langsung masyarakat, seperti beasiswa, fasilitas sekolah, perpustakaan, dan lain sebagainya.

3. Daya Beli

- a. Peningkatan dalam mengembangkan BLK guna menghasilkan tenaga kerja yang professional,
- b. Adanya kerja sama antara swasta dan pemerintah serta masyarakat untuk membentuk Sumber Daya Manusia yang berkualitas
- c. Mengupayakan pembangunan infrastruktur dan sarana perekonomian secara merata di seluruh wilayah Kabupaten pemalang;
- d. Meningkatkan investasi dengan mengupayakan pembangunan untuk menunjang sarana dan prasarana investasi;
- e. Mengembangkan potensi calon tenaga kerja dengan adanya pelatihan baik kerja langsung maupun melakukan usaha;
- f. Lebih berfokus pada hal yang langsung melibatkan masyarakat khususnya pada penganggaran dana atau alokasi dana yang ada di dalam kedinasan terkait untuk lebih memprioritaskan kegiatan yang dirasakan langsung masyarakat.

DAFTAR RUJUKAN

- Kuncoro, Mudrajad. 2001. *Metode Kuantitatif: Teori dan Aplikasi Untuk Bisnis dan Ekonomi*. Yogyakarta: AMP YKPN.
- Subarsono, AG. 2005. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pusaka Pelajar.
- Dunn, Willian. 1999. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua*. Yogyakarta: Gadjah mada University press.
- Smith, Tandoro. 2006. *Pembangunan Ekonomi Edisi 9 Jilid 2*. Jakarta: Erlangga.
- Waidl, Abdul, dkk. 2008. *Mendahulukan Si Miskin: Buku Sumber Bagi Anggaran Pro Rakyat*. Yogyakarta: LKiS.
- Bappeda. 2010. *Penyusunan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Pemalang: Laporan Pendahuluan*. Pemalang:_____.
- Bappeda. 2010. *Penyusunan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Pemalang:*

Laporan Antara. Pemalang:_____.

Bappeda. 2010. *Penyusunan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Pemalang: Laporan Akhir*. Pemalang:_____.

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah kabupaten Pemalang Tahun 2011-2016